

Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2022)

Kelvin Diva Pratama^{*}, Elly Halimatusadiah, Riyang Mardini

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*divapratamakelvin@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com, riyangmardini20@gmail.com

Abstract. Regional Original Revenue is revenue received by the region and collected based on applicable regulations in accordance with the legislation. Regional Original Revenue (PAD) is one of the important sources of revenue for local governments in order to support the implementation of regional autonomy. This research is based on the phenomenon of a decrease in Regional Original Revenue. This study aims to determine how the effect of Motor Vehicle Tax Revenue and Motor Vehicle Title Transfer Fees on Regional Original Revenue. The research method used in this research is descriptive verification with a quantitative approach. This study uses secondary data, with the sample selection used in this study, namely purposive sampling so that a total of 108 data samples were obtained per region of the Motor Vehicle Tax revenue report, the Motor Vehicle Title Transfer Fee, and the Regional Original Revenue report during the period 2019 to 2022 of the West Java Province Regional Original Revenue Agency (BAPENDA). Data analysis using panel data multiple regression analysis. The results showed that Motor Vehicle Tax Revenue had a significant positive effect on Regional Original Revenue and Motor Vehicle Title Transfer Fees had no effect on Regional Original Revenue.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Local Revenue.*

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini didasarkan pada fenomena terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 108 sampel data per wilayah laporan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan laporan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2019 hingga 2022 Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah.*

A. Pendahuluan

Peraturan Daerah mewajibkan setiap daerah untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi ini mendorong daerah untuk mencari sumber pendapatan yang inovatif, dengan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu alternatif utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan bagian penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, "Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Guna menunjang keberlangsungan pemerintah daerah untuk memajukan masyarakat, masih terdapat banyak sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih harus ditelusuri dan dioptimalkan oleh pemerintah, untuk terus meningkatkan penerimaan daerah agar pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diterima dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Fenomena yang telah terjadi dilapangan mengenai Pendapatan Asli Daerah dikatakan (Kurniawan, 2021 dalam rmljabar.id) Pada tahun 2021, Kepala Badan Pembangunan dan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Lindu Praespasi, menyebutkan Kota Bandung menargetkan penghasilan pendapatan PAD sebesar 2,7 triliun pada tahun 2021. Sementara itu akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebar pada pertengahan Maret 2020, telah berdampak pada penerimaan pendapatan PAD sebesar 2,7 triliun yang mengurangi penerimaan pajak daerah secara signifikan

Sektor perpajakan masih menjadi peran penting sebagai sumber penghasilan terbesar untuk mendanai belanja daerah. Dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar, agar pertumbuhan ekonomi meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pendapatan guna menunjang pembangunan. Setiap daerah berlomba-lomba mencari anggaran yang ditetapkan dalam APBD, termasuk PAD (Nuroktaviani & Halimatusadiah, 2022)

Dalam Pajak Provinsi terdapat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah terbesar bagi sektor pajak daerah. Hal ini terjadi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi, baik kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Kemudian, adanya kemudahan pembelian kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat semakin konsumtif untuk membeli kendaraan.

Kemudian (Yundrika et al., 2023) menyatakan: "Salah satu pemasukan pajak daerah yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun Potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal".

Fenomena yang telah terjadi dilapangan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan (Padna, 2023 dalam jabar.tribunnews.com) Pendapatan Daerah (Samsat) Kabupaten Pangandaran, Adun Abdullah Safi'i menyebut tercatat ada sekitar 98.000 potensi kendaraan bermotor untuk membayar pajak yang terdiri dari kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Sejumlah 98.000 potensi kendaraan bermotor untuk membayar pajak, terdapat penunggakan yang terjadi sebanyak 26.000 kendaraan bermotor yang bersumber dari kendaraan roda dua.

Sementara itu menurut (Rayanti, 2023) Terdapat kecenderungan untuk enggan

melakukan proses balik nama kendaraan bekas karena biayanya yang seringkali lebih tinggi daripada nilai kendaraan itu sendiri. Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, menyoroti adanya biaya balik nama kendaraan bekas dapat menjadi dorongan bagi sebagian masyarakat untuk menghindari kewajiban tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya berpendapat yaitu (1) peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Takalar setiap tahunnya membuat Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar (Auliah 2018); (2) (Rakatitha & Gayatri 2017) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Didasarkan penjelasan tersebut, jika dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode (2019 – 2022)”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode verivikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi didalam penelitian ini yaitu merupakan laporan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik nonprobability sampling. Teknik yang dipakai dalam nonprobability sampling yaitu menggunakan sampling purposive.

Kriteria yang akan menjadi penentu sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Pendapatan Asli Daerah tahunan pada tahun periode 2019-2022 dengan pertimbangan terjadinya fenomena karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun tersebut.
2. Laporan realisasi penerimaan tahunan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara lengkap pada tahun periode 2019-2022

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan data sekunder. Dimana sumber data yang diperoleh dari catatan atau laporan yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dengan bantuan teknik pengolahan data Eviews 12. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear berganda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari seleksi sampel dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling diperoleh perusahaan sebagai sampel penelitian tahun pengamatan periode 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 27 wilayah di Provinsi Jawa Barat. Jadi jumlah observasi yang memenuhi kriteria sampel selama tahun pengamatan periode 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah 108 observasi.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi umum tentang karakteristik variabel penelitian yang berupa nilai tertinggi nilai terendah, dan rata-rata, dari variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah

NILAI MAXIMUM	1,332,919,444,850	817,514,230,000	3,761,911,243,274
NILAI MINIMUM	20,290,592,600	10,034,711,600	105,276,341,355
RATA - RATA	304,303,224,262	196,470,919,685	897,491,239,172

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah data yang didapat kan sebanyak 108 data dengan 27 wilayah di Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun dari tahun 2019-2022. Berikut interpretasi dari statistik deskriptif pada tabel diatas:

1. Nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) yang tertinggi sebesar Rp. 1,332,919,444,850 terdapat pada wilayah Kota Bandung pada tahun 2022. Sedangkan nilai variabel Pajak Kendaraan Bermotor yang terendah sebesar Rp. 20,290,592,600 terdapat pada wilayah Kota Banjar pada tahun 2020. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata rata variabel Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 304,303,224,262.
2. Nilai variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) yang tertinggi sebesar Rp. 817,514,230,000 terdapat pada wilayah Kota Bekasi pada tahun 2019. Sedangkan nilai terendah variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 10,034,711,600 terdapat pada wilayah Kota Banjar pada tahun 2020. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata rata variabel Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 196,470,919,685.
3. Nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) yang tertinggi sebesar Rp. 3,761,911,243,274.10 terdapat pada wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2021. Sedangkan nilai terendah variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 105,276,341,355.00 terdapat pada wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata rata variabel Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 897,491,239,172.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 07/13/24 Time: 20:09
Sample: 2019 2022
Periods included: 4
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.60143	0.148239	179.4493	0.0000
X1	2.20E-12	5.62E-13	3.917604	0.0002
X2	-6.79E-14	2.81E-13	-0.241586	0.8098

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2. tersebut, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 26.6014349494 + 2.20213597947e-12 * X1 - 6.79153456372e-14 * X2$$

Berdasarkan model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai konstanta sebesar 26,601 artinya apabila variabel independen yaitu variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- (X2) dianggap konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 26,601.
- Koefisien variabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) menunjukkan nilai positif sebesar 2.202, artinya jika Pajak Kendaraan Bermotor (X1) mengalami peningkatan 1 satuan, sedangkan variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) bernilai konstan maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) mengalami peningkatan sebesar 2,202.
 - Koefisien variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) menunjukkan nilai negatif sebesar -6,79, artinya jika variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) mengalami peningkatan 1 satuan sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) bernilai konstan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) mengalami penurunan sebesar -6,79.
- Uji hipotesis bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.60143	0.148239	179.4493	0.0000
X1	2.20E-12	5.62E-13	3.917604	0.0002
X2	-6.79E-14	2.81E-13	-0.241586	0.8098

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependen) yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai probabilitas variabel Pajak Kendaraan Bermotor sebesar $0,0002 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai probabilitas variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar $0,809 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima, artinya secara parsial variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2022. Adanya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya peran dari pemerintah Provinsi yang terus melakukan upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat terutama terkait keluhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2022. Hal ini dikarenakan kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama atas kendaraannya ketika melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Permukaan, Pajak Rokok, dan lain-lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 – 2022 di Provinsi Jawa Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 – 2022.

Acknowledge

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2022). penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Bibing Nurnaning Rum dan Ayahanda tercinta Adi Setiadi yang selalu mendoakan, menasihati, dan mendorong penulis agar dapat memperoleh atau meraih ilmu baik moril dan materil. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Elly Halimatusadiah, SE, M.Si, Ak, CA dan Ibu Riyang Mardini, SE, M.Ak, Ak selaku dosen pembimbing yang memiliki dedikasi tinggi, ketekunan dan Ikhlas dalam mendampingi, membimbing, memberikan semangat, mengoreksi dan meluruskan jalannya penelitian ini dari awal pembuatan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Kurniawan, R. (2021, July). Ditengah Pandemi Covid-19, Bapenda Kota Bandung Ditarget PAD Rp 2,7 T.
- [2] Nuroktaviani, N. P., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1118>
- [3] Yundrika, A. S., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Bandung Conference Series: Accountancy <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6596>.
- [4] Rayanti, D. (2023). Bea Balik Nama Kendaraan Bekas Dinolkan: Lebih Mahal dari Harga Kendaraannya.
- [5] Auliah, A. N. S. M. I. M. (2018). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TAKALAR. Jurnal Riset Edisi XXVI, 4(003).
- [6] Rakatitha, P. N. K., & Gayatri. (2017). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH. E-Jurnal Akuntansi, 21(2), 1575–1600.
- [7] Dewi, A. P., & Halimatusadiah, E. (2022). Perancangan Sistem Informasi Bengkel Motor X. Jurnal Riset Akuntansi, 1(2), 100–109. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i2.517>
- [8] Vannisa Regita Putri, Nunung Nurhayati, & Riyang Mardini. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Riset Akuntansi, 129–134. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.2827>
- [9] Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>